

PEMBANGUNAN SOSIAL, KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN PEKERJAAN SOSIAL

Toton Witono

Widyaiswara Ahli Madya, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial

E-mail: totonwitono@gmail.com

Abstract

What are social welfare, social development, and social work? How are they related each other? This paper is an effort to answer these questions by clarifying these concepts and their short history and also examining their relationships. Social welfare is a precondition to make the national goal come true. The government's political ideology will determine the approach in achieving social welfare that underlie programs and policies making. In general, there are two major views by which social welfare is pursued, ie. residual and institutional. Amidst the two contradictory approaches, social development emerged as the alternative discourse. Social development is an in-between-approach that is in line with both residual and institutional view. Actually, social work is also an approach as well as one of professional groups in social welfare. Nevertheless, this profession can be adaptable to implement the mainstream approaches and is compatible with social development.

Keywords: *Social welfare, social development, and social work.*

1. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menyatakan Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk dalam rangka “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Sila kelima Pancasila turut menegaskan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial (kesos) menjadi bagian tersendiri (Bab XIV) yang terdiri dari Pasal 33 dan 34. Dalam Amandemen UUD 1945 tahun 2002, nama Bab XIV ini diubah menjadi *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*. Di samping dua pasal tersebut, Pasal 27 juga terkait erat dengan masalah kesos. Di dalamnya diamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan UUD 1945 di atas, terciptanya masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Cita-cita nasional ini membutuhkan prasyarat tercapainya kondisi kesejahteraan sosial. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, kebijakan pembangunan sosial (*social development*) disusun, sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Terkait dengan ini, Edi Suharto (2006) menerangkan bahwa pembangunan sosial mencakup berbagai bidang yang luas seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Menurutnya, di dalam pembangunan sosial juga tercakup pembangunan kesejahteraan sosial.

Kebijakan pembangunan kesos dibuat untuk mengatur segala upaya atau usaha yang

terencana dan melembaga. Landasan pijaknya berupa Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* (UU Kesos 2009). Dalam Penjelasan, pembangunan kesos yang digariskan dalam UU Kesos ini merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai cita-cita nasional. Dan aktor utama pembangunan kesos, menurut Suharto (2008), adalah pekerja sosial yang memiliki kompetensi dalam disiplin ilmu atau profesi pekerjaan sosial. Artikel ini akan menguraikan konsep pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, dan pekerjaan sosial beserta keterkaitan antara ketiganya.

2. MENGENAL PEMBANGUNAN SOSIAL

Dalam memahami pembangunan kesejahteraan sosial, ada baiknya membahas konsep lebih luas yang melingkupinya, yakni pembangunan sosial. Di sini akan disinggung kemunculan dan perkembangan pembangunan sosial, definisi dan karakteristiknya, juga beberapa pendekatan dalam kesejahteraan sosial.

2.1. Bagaimana Pembangunan Sosial Muncul dan Berkembang?

Menurut Midgley (1995) dan Midgley & Pawar (2017), istilah pembangunan sosial (*social development*) muncul tahun 1940 hingga 1950-an. Midgley (1995) menjelaskan pembangunan sosial mengemuka sebagai respons atas pembangunan yang salah arah atau terdistorsi (*distorted development*). Pembangunan ekonomi yang digerakkan oleh industrialisasi menyebabkan ketertinggalan negara-negara berkembang (Dunia Ketiga). Kemiskinan dan kelaparan masih banyak terjadi. Pembangunan yang terlalu berorientasi ekonomi menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang luar biasa. Intinya ada ketidakharmonisan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan atau intervensi sosial.

Seperti diketahui, dekade 1970 dan 1980-an pembangunan didominasi ideologi liberalisme yang mengutamakan ekonomi pasar bebas (*free market* atau *laissez faire*). Ekonomi pasar sangat meyakini peran 'tangan tak terlihat' (*invisible hand*) dalam menciptakan kemakmuran masyarakat. Teori *invisible* (yang diciptakan Adam Smith dalam buku *Wealth of Nation*) percaya bahwa kinerja pasar menjadi efisien tanpa campur tangan pemerintah. Pasti akan ada faktor tertentu yang tidak terlihat yang mampu menciptakan persaingan yang sehat dan wajar. Kondisi pasar yang seimbang dengan sendirinya akan menguntungkan semua pihak dan pada gilirannya akan membawa kemakmuran bagi semua. Para pendukungnya (*anti-statist*) tidak menerima adanya campur tangan atau intervensi negara dalam mengatur pasar.

Di sisi lain, berbagai ketidakpuasan muncul karena kegagalan ekonomi pasar, yang juga digerakkan oleh pengaruh globalisasi, dalam mengatasi permasalahan masalah sosial, kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, kelaparan, dan seterusnya. Angka statistik Pendapatan Domestik Bruto (PDB) memang menunjukkan perbaikan, "namun cara hidup dan nilai-nilai dasar terancam," kata Stiglitz (2006, p. 292). Alih-alih mampu memerangi kemiskinan, ideologi ekonomi pasar malah menciptakan kemiskinan baru dan kerusakan lingkungan kian parah. Sebagai upaya nyata dalam menentang ekonomi pasar, sejumlah pakar dan pemimpin dunia pendukung pembangunan sosial menggagas pertemuan dengan mengadakan *the World Summit of Social Development* di Copenhagen tahun 1995. Pertemuan ini menghasilkan *Copenhagen Declaration* berisi tujuan pembangunan sosial yang lebih spesifik (Midgley & Pawar, 2017).

Sejak saat itu konsep pembangunan sosial mulai mengemuka untuk mengimbangi hegemoni ekonomi liberal/pasar. Menurut Midgley & Pawar (2017), pembangunan sosial semakin populer

dan ada pemahaman yang lebih jelas dengan adanya tujuan pembangunan milenium (MDGs). Dengan kesepakatan global pembangunan ini, begitu banyak ragam proyek pembangunan sosial berbasis komunitas diperkenalkan dan banyak lembaga nasional didirikan di sejumlah negara berkembang. Tahun 2015 digantikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan cakupan lebih luas dibanding MDGs dan mencakup banyak wilayah yang sebelumnya terabaikan. Dalam SDGs ditetapkan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Perhatikan Gambar 2.1.

2.2. Apa itu Pembangunan Sosial?

Payne (2005) menyatakan bahwa gagasan tentang pembangunan sosial sangat beragam dan

definisinya pun banyak menjadi perdebatan. Salah satu definisi yang sering dikutip adalah dari Paiva yaitu: “pembangunan kapasitas manusia untuk bekerja secara menerus demi kesejahteraan mereka sendiri dan masyarakatnya” (dalam Payne, 2005, p. 217). Definisi ini sangat menekankan pada kapasitas individu, meskipun Paiva menyatakan tidak tertutup bagi aspek penting lain semacam perubahan struktural, integrasi sosio-ekonomi, perkembangan dan pembaruan institusional. Definisi lain, misalnya datang dari Jones dan Pandev yang lebih fokus pada unsur pembangunan institusional, yakni dengan membuat institusi sosial mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia secara tepat melalui kebijakan dan program sosial.



Gambar 2.1. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan

Sumber: *PBB di Indonesia*, Newsletter Februari 2015

Penekanan dan definisi pembangunan sosial terus berkembang. Menurut Hardiman dan Midgley (1980), seperti disinggung Payne (2005), dijumpai pula pergeseran pandangan dari yang

awalnya sangat terfokus pada perencanaan ekonomi ke arah perencanaan sosial. Sehingga berbagai institusi dibentuk dalam rangka mendukung kemajuan ekonomi. Kemudian, muncul lagi

pandangan yang lebih baru dan resmi. Pandangan yang dipengaruhi aliran *ecodevelopmentalism* ini memposisikan “manusia sebagai pusat dari pembangunan; menganggap pertumbuhan ekonomi hanya sebatas alat, bukan tujuan; melindungi kesempatan hidup generasi masa depan dan masa kini; dan menghormati lingkungan alam tempat semua kehidupan bergantung” (UNDP, 1994 dalam Payne, 2005, p. 217).

Menurut Payne (2005), konsep dan definisi yang modern tentang pembangunan sosial muncul dari James Midgley. Dalam buku *Social Development*, Midgley (1995, p.16) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai “serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia.” Sebagai perbandingan, Edi Suharto (2006) memahaminya sebagai “pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan modal ekonomi, manusia, kemasyarakatan, dan perlindungan secara terintegrasi dan berkesinambungan.”

Dalam buku Midgley (1995) juga, sebetulnya menyinggung beberapa konsep atau definisi pembangunan sosial, tergantung disiplin ilmu yang dipakai. Sebagai contoh saja, pembangunan sosial menurut disiplin ilmu sosiologi dipahami secara abstrak sebagai proses perubahan terencana atau terpandu. Atau bisa juga diartikan sebagai “seperangkat panduan dalam menerapkan teknologi sosial untuk menciptakan tindakan yang cerdas/intelektual.” Sedangkan dalam disiplin ilmu perkembangan psikologi, sebagai perbandingan, *social development* terkait erat dengan perkembangan anak-anak, khususnya penguasaan keterampilan sosial anak-anak.

Lain lagi *social development* yang dipahami Jim Ife (2013). Ia membahas istilah ini dalam konteks lain, yakni sebagai satu dari delapan

dimensi pokok dalam pengembangan komunitas (*community development* atau biasa disingkat *comdev*). Dimensi-dimensi lain contohnya seperti ekonomi, politik, kultur, lingkungan, dan bahkan spiritual. Maka *social development* di sini lebih tepat diterjemahkan sebagai perkembangan sosial, bukan pembangunan sosial seperti dimaksud Midgley. Menurut Ife, awalnya *social development* sering dianggap sama dengan *comdev*, terutama terkait aktivitas yang dilakukan oleh sejumlah profesi seperti pekerjaan sosial, pendidikan, kesehatan, dan juga aktivitas kepemudaan. Ada empat macam *social development* dalam konteks ini, yaitu: pengembangan layanan (*service development*); pusat komunitas; perencanaan sosial; dan animasi sosial (p. 214).

Terkait hal *social development* dan *comdev*, Malcolm Payne (2005) menjelaskan bahwa keduanya memang berkaitan, namun secara praktik beda wilayah. *Comdev* merupakan satu bentuk kerja komunitas, sedangkan *social development* adalah penerapan dari *comdev* di negara-negara berkembang. Di beberapa negara yang miskin sumberdaya, *social development* adalah satu bentuk aktivitas dominan atau bentuk utama intervensi yang dipraktikkan oleh pekerja sosial. Sedangkan *comdev* atau kerja komunitas kebanyakan dipraktikkan di Barat. Di akhir periode kolonial, *social development* tumbuh berkembang melampaui *comdev*. Keduanya memiliki beberapa teknik yang mirip dan saling mempengaruhi, terutama ketika banyak proyek *social development* dari PBB dijalankan di negara-negara berkembang, dimana pekerja sosial dari Barat turut terlibat. *Social development* juga berkaitan dengan pendekatan partisipatif yang membutuhkan keterampilan interpersonal dan komunikasi kelompok. Dan keterampilan semacam ini banyak dikuasai pekerja sosial ketika melakukan praktik pemberdayaan.

2.3. Pendekatan Pembangunan Sosial

Menurut Midgley (1995), pembangunan sosial muncul sebagai respons terhadap *distorted development*. Pembangunan sosial dianggap sebagai satu pendekatan terhadap kesejahteraan sosial yang menawarkan respons efektif terhadap masalah sosial yang ada. Pendekatan ini sangat berbeda dengan tiga pendekatan lain dalam upaya mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pendekatan-pendekatan tersebut juga berbeda dalam memahami konsep *social welfare*.

Midgley (1995) menguraikan tiga pendekatan dalam kesejahteraan sosial yang berbeda dengan pembangunan sosial yang dimaksud, yaitu:

- a. Filantropi sosial dan bantuan karitatif (*social philanthropy & charitable giving*). Karakteristiknya sebagai berikut:
 - Upaya kesejahteraan sosial dengan memberikan sebagian milik pribadi dan layanan kepada orang-orang yang membutuhkan.
 - Akar sejarahnya berupa kegiatan amal yang bersifat pribadi yang didasari motivasi kepercayaan agama.
 - Selanjutnya dilakukan lewat organisasi-organisasi dengan menyediakan tempat tinggal bagi yang membutuhkan.
 - Abad ke-19, muncul badan-badan filantropi di kota-kota besar di Eropa dan Amerika Utara.
 - Makin kini, muncul juga agensi atau lembaga, seperti *Charity Organization Society* (COS) yang bertujuan meningkatkan koordinasi upaya filantropi dan menciptakan teknik-teknik filantropi baru. Kemunculan profesi pekerjaan sosial berasal dari upaya-upaya organisasi tersebut.
- b. Pekerjaan sosial dan intervensi profesional, yang memiliki ciri:
 - Pendekatan terorganisir untuk meningkatkan kesejahteraan sosial menggunakan tenaga-tenaga profesional bermutu untuk menghadapi masalah sosial.
 - Muncul di negara-negara industri pada pertengahan abad ke-19.
 - Fokus praktik pekerjaan sosial adalah intervensi langsung untuk mengatasi masalah sosial secara efektif.
 - Pekerjaan sosial tradisional: pelayanan *remedial* untuk mengatasi masalah sosial individu dan keluarga.
 - Saat ini, pekerjaan sosial telah mencakup pelayanan yang bersifat *remedial* maupun *non-remedial*. Contoh layanan *remedial*: konseling dan bentuk-bentuk remedial lain. Contoh *non-remedial*: *social policy, research, non-therapeutic group work*, perencanaan layanan sosial di tingkat lokal/komunitas, dan *community action*.
- c. Administrasi sosial dan pelayanan sosial (*social administration and the provision of welfare services*):
 - Peningkatan kesejahteraan sosial dengan membuat program - program sosial pemerintah melalui berbagai macam pelayanan sosial.
 - Dikenal dengan pendekatan *social policy/ social services*.
 - Pendekatan ini mengarahkan sistem sumber ke kelompok-kelompok warga negara yang lebih besar dan luas (semua warga negara mendapat layanan tanpa kecuali).
 - Pendekatan ini didasarkan atas ide bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara.
 - Asal mula keterlibatan pemerintah dalam kesejahteraan sosial adalah dibentuknya

The Poor Law di Inggris (masa Ratu Elizabeth I), ditujukan bagi warga negara yang paling membutuhkan.

- Negara-negara yang menyediakan layanan sosial dikenal dengan '*Welfare State*'.

James Midgley (1995) menegaskan bahwa pendekatan pembangunan sosial sangat berbeda dari tiga pendekatan di atas dari sisi upaya menghubungkan langsung kebijakan dan program sosial dengan proses menyeluruh pembangunan ekonomi (*economic development*). Menurutnya, pembangunan sosial dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang dengan mengharmoniskan intervensi sosial dan pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial tidak menangani individu, seperti menyediakan kebutuhan, layanan, dan rehabilitasi, tapi lebih fokus pada komunitas atau masyarakat dan pada proses atau struktur yang lebih luas. Pembangunan sosial bersifat dinamis karena mengikuti proses perkembangan dan perubahan yang terjadi. Selain itu, sebagai pendekatan alternatif, pembangunan sosial bisa dianggap sebagai ekstensi dari dikotomi residual dan institusional.

Kemudian, bagaimana pembangunan ekonomi bisa terjadi dalam konteks pembangunan sosial? Midgley dan Livermore (1997), seperti dinukil Kirst-Ashman (2010), menjelaskan tiga prasyarat. *Pertama*, program layanan yang bersifat investasi dalam pendidikan, gizi, dan kesehatan mesti lebih diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja dengan *skill/* keahlian tertentu. Sehingga, nantinya dapat membangun ekonomi yang lebih kuat. *Kedua*, investasi untuk sarana dan prasarana fisik meliputi infrastruktur sosial-ekonomi seperti jalan, jembatan, irigasi, klinik, sekolah, dan sebagainya agar sumberdaya yang diperuntukkan untuk membangun fasilitas tersebut bersifat produktif. *Ketiga*, pelibatan para pemerlu dalam program padat karya dianggap

lebih menguntungkan secara ekonomi ketimbang memberikan bantuan sosial (p. 9).

Menurut Midgley (1993), seperti dikutip Payne (2005, p. 218), terdapat tiga tipe atau strategi ideologi pembangunan sosial sebagai berikut:

- a. *Strategi individualis* yang fokus pada aktualisasi diri, kemampuan menentukan diri sendiri (*self-determination*) dan pengembangan diri (*self-improvement*). Menurut Midgley (1995), strategi ini turunan dari ideologi liberal yang menyatakan bahwa masyarakat ideal adalah masyarakat dimana individu diberikan hak asasi, kebebasan, pilihan rasional dan memiliki kapasitas menentukan nasib mereka sendiri.
- b. *Strategi kolektivis* yang menekankan pada pemangunan organisasi sebagai wadah pengembangan pendekatan baru untuk aksi nyata. Strategi ini disebut juga sebagai pendekatan institusional. Strategi ini turunan dari ideologi sosialis. Midgley (1995) memandang bahwa kolektivitas adalah yang paling utama agar masyarakat yang memiliki sumber daya secara kolektif dan memiliki kewenangan bersama dalam pengambilan keputusan.
- c. *Strategi populis* yang lebih fokus pada kegiatan-kegiatan skala kecil yang berbasis komunitas lokal.

Sebelumnya, Pandey (1981) dalam Payne (2005, p. 218) telah lebih dulu merinci tiga strategi dasar berdasarkan tujuan atau tipe kegiatan, yaitu:

- a. *Strategi distributif* bertujuan memperbaiki kesetaraan sosial antar kelompok secara nasional.
- b. *Strategi partisipatif* dengan tujuan melakukan reformasi struktural dan institusional dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan perubahan sosial.

- c. *Strategi pembangunan manusia (human development)* bertujuan meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat agar mampu bertindak atas nama diri mereka sendiri dalam memperbaiki pembangunan ekonomi dan institusi di wilayah mereka.
- h. Tujuan *social development* adalah mengangkat kesejahteraan sosial.

Pembangunan sosial yang dirumuskan James Midgley (1995) dalam bukunya adalah “pendekatan terhadap kesejahteraan sosial yang menawarkan respons efektif terhadap masalah sosial yang ada.” Pendekatan ini memiliki karakteristik:

- a. Proses pembangunan sosial sangat terkait dengan pembangunan ekonomi.
- b. Pembangunan sosial memiliki fokus interdisipliner yang menggunakan teori-teori dari beragam ilmu sosial.
- c. Konsep pembangunan sosial lebih menekankan kepada proses, karena pembangunan sosial merupakan sebuah konsep dinamis memiliki ide-ide tentang perkembangan dan perubahan yang bersifat eksplisit.
- d. Proses perubahan bersifat progresif karena pembangunan sosial harus mengacu pada ide-ide perbaikan dan peningkatan sosial.
- e. Proses pembangunan sosial bersifat intervensionis, yakni adanya usaha yang terencana untuk menuju perubahan dalam kesejahteraan sosial.
- f. Tujuan pembangunan sosial dicapai dengan bermacam strategi yang langsung/ tak langsung menghubungkan intervensi sosial dengan upaya-upaya pembangunan ekonomi. Berbagai strategi tersebut didukung dengan ragam keyakinan dan ideologi tentang bagaimana tujuan-tujuan *social development* sebaiknya dicapai.
- g. Cakupan *social development* bersifat inklusif dan universal, yakni dengan memperhatikan rakyat secara menyeluruh.

Midgley dan Pawar (2017) berpendapat bahwa implementasi pembangunan sosial melalui beragam proyek dan program memiliki dampak positif bagi kondisi sosial negara-negara berkembang. Ini tercermin dari penurunan angka kemiskinan, kenaikan pendapatan, kebutuhan dasar terpenuhi, tingkat pendidikan membaik, angka harapan hidup naik, akses terhadap pelayanan kesehatan juga naik. Berbagai program dan proyek tersebut dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-profit, lembaga pengembangan/pemberdayaan, komunitas lokal, ataupun oleh keluarga.

Meskipun begitu, Midgley dan Pawar (2017) masih mengakui bahwa kemajuan dan kesejahteraan yang terjadi tidak lah merata. Masih banyak kemiskinan global di beberapa negara. Intinya, pembangunan sosial tidak bisa dikatakan telah mampu mengatasi masalah-masalah sosial di negara berkembang. Secara konsep, pembangunan sosial juga belum begitu mapan. Selain itu, masih ada kesalahpahaman dan mispersepsi terhadap konsep ini.

Dari kondisi tersebut konsep atau pendekatan pembangunan sosial masih sangat terbuka untuk direvisi dan disempurnakan sesuai perkembangan global dan konteks lokal dimana pembangunan sosial diterapkan. James Midgley sendiri sempat menawarkan perubahan atau perkembangan konsep pembangunan sosial, yakni dari perspektif institusional (1995) ke strukturalisme institusional (2014).

3. APA MAKNA KESEJAHTERAAN SOSIAL?

Menurut Kirst-Ashman (2010, p.6), kesejahteraan sosial merupakan konsep luas terkait kesejahteraan semua orang di masyarakat. Namun, intinya ada dua hal mendasar tentang kesejahteraan sosial: (1) apa yang bisa orang peroleh dari masyarakat (terkait

program, manfaat, dan layanan) dan (2) seberapa jauh/baik kebutuhan mereka terpenuhi (termasuk sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan).

Pemahaman terhadap makna kesejahteraan sosial (*social welfare*) akan menentukan pendekatan atau strategi dalam mencapainya. Menurut Midgley (1995), pengertian *social welfare* sering disalahartikan atau disalahgunakan. Asal-mulanya dipahami sebagai kondisi sejahtera, aman, sentosa, bahagia. Namun saat ini disamakan dengan kegiatan atau program yang bersifat karitatif, bantuan, atau belas-kasihan (*charity*). Di Amerika Serikat saja misalnya, *social welfare* diidentikkan dengan bantuan sosial untuk rumah tangga miskin dan anak-anaknya. Padahal, para pendirinya berpikir tentang kondisi sejahtera secara ekonomi, sosial, dan politik ketika menyebutkan *social welfare* sebagai tujuan negara didirikan.

Zastrow (2017) juga menambahkan bahwa istilah kesejahteraan sosial memiliki dua makna yang berbeda, yakni sebagai institusi atau lembaga dan juga sebagai sebuah disiplin ilmu. Pengertian yang dijelaskan Midgley di atas adalah kesejahteraan sosial sebagai institusi, sistem, atau program pelayanan. Dalam konteks tersebut, Zastrow (2017, p. 2-3) mengutip Barker (1999) dalam mendefinisikan kesejahteraan sosial, yaitu: “sistem negara terkait program, manfaat, dan pelayanan yang membantu warganya memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi,

pendidikan, dan kesehatan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan masyarakat.” Institusi kesejahteraan sosial dapat merujuk ke program kesejahteraan sosial dan lembaga pelayanan sosial. Institusi tersebut ditopang oleh kebijakan dan peraturan yang tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan kondisi sejahtera bagi pihak pemerlu layanan. Caranya antara lain melalui pencegahan, pengentasan, atau berkontribusi terhadap pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan.

Kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu memiliki keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lain yang mengkaji tentang masalah sosial, sebab-musababnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Misalnya dengan sosiologi, psikologi, psikiatry, antropologi, ilmu politik, dan disiplin lain yang terkait. Masing-masing memiliki fokus kajian yang berbeda, namun masih ada wilayah kesamaan. Terkait arsiran dengan ilmu kesejahteraan sosial, bidang-bidang ilmu tersebut merupakan dasar teori/pengetahuan bagi praktik kesejahteraan sosial (lihat Gambar 3.1). Ilmu kesejahteraan sosial juga sering disamakan dengan pelayanan sosial (*human services*), karena pada masa lampau *human services* juga disebut sebagai kesejahteraan sosial. Padahal, bidang ilmu *human services* lebih luas lagi dibanding kesejahteraan sosial karena mencakup segala jenis pelayanan, bidang pekerjaan, dan ragam profesi (Zastrow, 2017).



Gambar 3.1. Keterkaitan kesejahteraan sosial dengan berbagai bidang disiplin ilmu

Sumber: Zastrow (2017, p. 3)

Midgley (1995) menguraikan bahwa *social welfare* atau *social well-being* punya aspek subjektif dan objektif dan punya definisi kualitatif maupun kuantitatif. Kesejahteraan sosial dapat ditentukan berdasarkan perasaan subjektif seseorang tentang kondisi sejahtera (*people's subjective feelings of well-being*) dan situasi-situasi sosial seperti apa yang berasosiasi dengan perasaan tersebut.

Kesejahteraan sosial dalam pemahaman Midgley (1995) merujuk ke suatu kondisi sosial, bukan belas kasihan yang diberikan oleh individu secara filantropis. Bukan pula *charity* atau bantuan sosial dari pemerintah. Menurutnya, kondisi kesejahteraan sosial tercapai apabila keluarga, komunitas, dan masyarakat mengalami tingkat sejahtera yang tinggi. Midgley (1995) merumuskan tiga elemen atau dimensi yang menggambarkan kondisi sejahtera:

1. *Masalah sosial terkelola*. Sejauhmana keluarga, komunitas, dan masyarakat mampu mengelola masalah sosial. Meminjam istilah Titmuss (1974), ketidakmampuan mengelola disebut '*social illfare*'.
2. *Kebutuhan sosial terpenuhi*. Kebutuhan fisik/biologis; pendidikan dan perawatan kesehatan; interaksi sosial yang harmonis; jaminan sosial. Komunitas/masyarakat yang kebutuhan sosialnya terpenuhi akan merasa sejahtera secara kolektif (*a collective sense of well-being*).
3. *Adanya kesempatan sosial untuk maju dan berkembang*. Misalnya kesempatan mendapatkan pendidikan, lowongan kerja, dan lain-lain dimana orang dapat mengembangkan potensi.

Midgley (1995) menegaskan, jika ketiga elemen tersebut terpenuhi, komunitas/masyarakat telah mencapai tingkat kesejahteraan yang memuaskan (*a satisfactory level of welfare*).

Di Indonesia, pengertian kesejahteraan sosial mengacu ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* (UU 11/2009 Kesos). Dalam UU ini, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai "kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya."

Zastrow (2017) menjelaskan ada dua pandangan atau pendekatan yang saling kontradiktif bagaimana kesejahteraan sosial harus berperan di masyarakat, yaitu pendekatan residual dan institusional. Pendekatan *residual* berprinsip bahwa pelayanan atau bantuan sosial tidak akan disediakan sampai ada individu atau kelompok yang tidak terlayani oleh lembaga lain. Peran residual sama seperti penambal lubang ketika ada kebocoran atau sebagai pertolongan pertama tatkala terjadi kecelakaan. Ibaratnya, mesti menunggu ada korban dulu, baru datang bantuan. Ciri utama dari pendekatan residual adalah pertolongan karitatif (*charity*) atau atas dasar belas-kasihan bagi mereka yang tidak beruntung. Menurut Zastrow (2017), akibat dari pandangan residual ini biasanya ada stigma tertentu yang disematkan pada penerima bantuan. Ambil saja contohnya dengan sebutan anak panti, keluarga miskin, penyandang cacat, orang jompo, dan sebagainya.

Lawan dari residual adalah pandangan atau pendekatan *institusional*. Menurut Zastrow (2017), pendekatan ini memandang berbagai program layanan kesejahteraan sosial disediakan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan karena memang mereka berhak menerimanya. Pelayanan sosial dipandang sebagai bagian dari peran dan fungsi masyarakat industri modern bagi pihak yang membutuhkan. Karena pelayanan bersifat tepat dan sah, stigma terhadap para pemerlu layanan cenderung tidak ada. Dengan pendekatan

ini, orang-orang yang tidak beruntung atau berada dalam kesulitan juga dipandang karena sebab-sebab di luar kontrol mereka. Misalnya, kemiskinan lebih disebabkan karena ketiadaan kesempatan untuk bekerja, bukan karena kemalasan atau kebodohan. Pada intinya, ketika ada masalah sosial muncul, pendekatan ini lebih mempermasalahkan kondisi lingkungan sekitar, ketimbang menyalahkan individu atau kelompok yang berada dalam kesulitan. Istilahnya, pendekatan institusional tidak suka menyalahkan si korban (*blaming the victim*).

Di negara-negara Barat, dua pandangan yang saling berlawanan tersebut menjadi perdebatan utama sepanjang masa terkait bagaimana jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara. Dua pendekatan tersebut terrepresentasi oleh dua ideologi politik yang juga menjadi musuh bebuyutan, yaitu liberalisme dan konservatisme. Kaum liberal mendukung pendekatan institusional, sementara kaum konservatif mati-matian membela pendekatan residual. Masing-masing menegaskan berbagai kelebihan pendekatan yang didukungnya dan mengkritik habis pendekatan lawan.

Di luar dua ideologi tersebut, Kirst-Ahman (2010) menyebut satu pendekatan yang lebih ekstrem lagi, yaitu *radikalisme*. Pendekatan ini sejak awal sudah meyakini bahwa sistem sosial politik yang ada saat ini secara struktur tidak akan mampu menopang tegaknya cita-cita keadilan sosial. Maka, perlu perubahan drastis dan bersifat fundamental dari sisi struktur dasar sosial-politik. Intinya harus ada struktur sosial baru. Jadi, ketika misalnya dihadapkan pada masalah kemiskinan, pejuang pendekatan ini akan melihatnya sebagai hasil dari eksploitasi kelas atas yang memerintah dan berkuasa. Kaum miskin ada karena salah urus dan kebijakan yang malah melanggengkan keberadaannya.

Di antara dua kutub liberalisme versus konservatisme yang saling berlawanan di atas,

Midgley tampil menawarkan pendekatan *social development* sebagai alternatif. Pendekatan yang dikenal sebagai perspektif pembangunan (*developmental perspective*) juga bisa dikatakan sebagai jalan tengah yang menarik perhatian kaum liberal dan konservatif secara bersamaan. Menurut Zastrow (2017), di satu sisi *social development* menarik bagi pendukung liberalisme karena mendukung pembangunan dan perluasan program-program pelayanan sosial yang dibutuhkan. Di sisi lain, pendekatan tersebut juga diterima penganut konservatisme karena pengembangan pelayanan sosial tertentu memiliki dampak positif bagi pembangunan ekonomi.

Selaras dengan uraian Zastrow di atas, Kirst-Ahman (2010) menjelaskan secara lebih sederhana dan langsung bahwa ada tiga perspektif bagaimana kesejahteraan sosial dicapai melalui program-program pelayanan, yaitu residual, institusional, dan developmental. Pada intinya, perspektif atau pendekatan *residual* fokus pada masalah dan kesenjangan. Layanan diberikan ketika orang tidak mampu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalahnya. Karena pendekatan ini bercirikan *blaming the victim*, ketidakmampuan itu dianggap sebagai kesalahannya sendiri. Sebaliknya, pendekatan *institusional* memandang ketidakmampuan tersebut sebagai hal yang normal dan wajar. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu dengan menyediakan layanan dan dukungan tertentu. Jadi, bukanlah salah mereka jika sampai membutuhkan bantuan. Bahkan sudah menjadi haknya untuk memanfaatkan program layanan.

Pendekatan *developmental* dianggap sebagai pandangan terbaru yang muncul setelah Perang Dunia II dengan mendesain program layanan kesejahteraan sosial yang cocok bagi negara-negara Dunia Ketiga. Kirst-Ahman (2010, p. 8) mengutip Midgley dan Livermore (1997) bahwa pendekatan *developmental* berupaya “mengidentifikasi berbagai

intervensi sosial yang memiliki dampak positif bagi pembangunan ekonomi.” Tahun 1970-an, pendekatan ini banyak diterapkan di Amerika Serikat karena dianggap sangat cocok dengan prinsip efisiensi ekonomi.

4. KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJAAN SOSIAL

Banyak pihak cenderung menyamakan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Padahal, keduanya berbeda. Menurut Zastrow (2017), keduanya sangatlah berkaitan di tingkat praktik. Dalam konteks pengertian kesejahteraan sosial sebagai sebuah disiplin atau bidang ilmu, hampir semua pekerja sosial bekerja di bidang kesejahteraan sosial. Wilayah pekerjaan sosial lebih kecil dibanding kesejahteraan sosial, dan pekerjaan sosial hanyalah satu bidang atau profesi di antara banyak bidang dalam kesejahteraan sosial (Perhatikan Gambar 3.1). Kesejahteraan sosial juga memiliki tujuan yang lebih luas, yakni “untuk memenuhi kebutuhan sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasional bagi seluruh individu dalam

masyarakat.” Dengan demikian, kesejahteraan sosial melibatkan berbagai profesi, seperti psikolog, psikiater, dokter, guru, perawat, perencana, jaksa, ahli terapi, dan juga pekerja sosial (Zastrow, 2007; 2017). Perhatikan Gambar 4.1.

Dalam sejarahnya, aktivitas dan profesi pekerjaan sosial muncul dari kesejahteraan sosial. Menurut Zastrow (2007; 2017), pekerjaan sosial muncul di negara-negara industri sebagai sebuah profesi yang selalu dikaitkan dengan pelayanan kesejahteraan sosial pada awal tahun 1800-an. Hingga awal tahun 1900-an, profesi ini diamalkan para aktivis kerohanian dengan memberi makan dan menyediakan tempat tinggal bagi kaum miskin perkotaan. Memasuki paruh kedua abad ke-19, lembaga pelayanan sosial non-pemerintah bermunculan di kota-kota besar untuk membantu gelandangan, fakir miskin, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Akan tetapi, pelayanannya masih belum terorganisir dengan baik dan beberapa programnya masih tumpang-tindih (Zastrow, 2007).



Gambar 4.1. Ragam profesi dalam kesejahteraan sosial
Sumber: Zastrow (2017, p. 5)

Pekerjaan sosial mulai diajarkan dalam pendidikan formal awal abad ke-20, yang diawali dengan diperkenalkannya pekerjaan sosial medis (*medical social work*) oleh Richard Cabot di Rumah Sakit Umum Massachusetts (Massachusetts General Hospital) pada tahun 1905. Tahun 1917, untuk

pertama kalinya teori dan metodologi pekerjaan sosial diperkenalkan oleh Mary Richmond melalui publikasi berjudul *Social Diagnosis*. Buku ini menerangkan intervensi terhadap individu bagi pekerja sosial (Zastrow, 2007).

Teori dan metode praktik pekerjaan sosial sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh ilmu-ilmu sosial atau humaniora, terutama psikologi dan sosiologi. Teori dan metodenya diapakai sebagai ilmu bantu dalam praktik pekerjaan sosial. Sebagai contoh, seperti dijelaskan Zastrow (2007), pada dekade tahun 1920-an sewaktu teori dan konsep psikoanalisis Sigmund Freud mempengaruhi hampir semua lini, praktik pekerjaan sosial juga banyak memakai pendekatan-pendekatan yang dipakai para psikiater pengikut Freud dengan pola satu lawan satu, yakni satu pekerja sosial menangani satu klien. Terapi pekerjaan sosial seperti ini bertahan hingga tiga dekade berikutnya. Baru pada dekade 1960-an psikoanalisis Freud diganti dengan pendekatan-pendekatan sosiologi lain.

Sampai saat ini, institusi-institusi berbasis agama masih menjadi aktor utama yang menyediakan berbagai layanan pekerjaan sosial. Akan tetapi, keilmuan pekerjaan sosial justru berkembang dengan cara sekuler. Menurut Sanzenbach seperti dikutip Jim Ife (1997), pekerjaan sosial konvensional dibangun di atas landasan paradigma ilmiah rasional. Pada saat itu, pekerjaan sosial juga tengah berupaya mencapai kemapanan ilmiah dan status profesional seperti halnya beberapa profesi pertolongan lain, seperti psikologi dan psikoterapi. Paradigma ilmiah cenderung menyepelkan aspek-aspek spiritualitas, agama, dan sakralitas. Padahal sejatinya aspek-aspek ini sangatlah penting ketika berbicara tentang eksistensi manusia secara utuh, dimana pekerjaan sosial diciptakan dalam rangka mempromosikan kondisi yang lebih baik.

Seperti diungkapkan di awal, pekerja sosial merupakan aktor utama pembangunan kesos. Sebagai pemeran utama, mereka harus memiliki kapasitas dalam bidang keilmuan pekerjaan sosial (Suharto, 2008). James Midgley (1995) pun telah menguraikan secara jelas bahwa pekerjaan

sosial merupakan satu pendekatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi para pemerlu.

Dalam UU kesejahteraan sosial sebelumnya (UU 6/1974 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*) bahkan dinyatakan secara eksplisit bahwa pekerjaan sosial dijadikan sebagai bidang ilmu teknis atau pendekatan dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. UU 11/2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*, pengganti UU 6/1974, tampaknya juga memiliki semangat yang sama bahwa pekerjaan sosial masih menjadi pendekatan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sejumlah kebijakan lain yang dikeluarkan Kementerian Sosial tetap menegaskan pekerjaan sosial sebagai pendekatan dalam penanganan masalah sosial. Sebagai satu contoh saja, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) 22/2014 tentang *Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Pekerjaan Sosial* jelas-jelas menjadikan pekerjaan sosial sebagai pendekatan dalam rehabilitasi sosial.

Jadi, jika ada pertanyaan bagaimana kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial berkaitan? Jawaban ringkasnya dapat dipinjam dari Kirst-Ashman (2010, p.6), bahwa “pekerjaan sosial memberikan layanan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi seseorang. Mereka melakukan hal itu di berbagai bidang dan *setting*...” Dan yang melakukan itu tidak hanya bidang pekerjaan sosial, akan tetapi banyak bidang lain turut terlibat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia.

5. PEKERJAAN SOSIAL

Sejarah kemunculan dan keterkaitan pekerjaan sosial dengan kesejahteraan sosial dan dengan pembangunan sosial telah digambarkan secara singkat di atas. Penjelasan tentang pekerjaan sosial sebagai satu pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial tidak mungkin dapat dijelaskan secara lengkap di sini. Berikut ini hanya akan

diuraikan definisi dan tujuannya beserta ciri khas atau keunikan pekerjaan sosial dibanding bidang keilmuan atau profesi pertolongan lain.

5.1. Definisi dan Tujuan Pekerjaan Sosial

Definisi internasional pekerjaan sosial dibuat oleh Federasi Internasional Pekerja Sosial (IFSW) dan Asosiasi Internasional Pendidikan Pekerjaan Sosial (IASSW). IFSW adalah semacam IPSPI (Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia) *level* internasional, sementara IASSW adalah IPPSI-nya (Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia). Pada bulan Juli 2014, the IFSW General Meeting dan the IASSW General Assembly menyepakati definisi pekerjaan sosial sebagai:

... profesi berbasis praktik dan merupakan suatu disiplin ilmu yang mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan sosial, kohesi sosial, serta pemberdayaan dan pembebasan manusia. Prinsip-prinsip tentang keadilan sosial, hak azasi manusia, tanggung jawab kolektif dan menghormati keberagaman sangat sentral bagi pekerjaan sosial. (*Global Definition of Social Work*, 2014).

Definisi tersebut sedikit berbeda dengan kesepakatan sebelumnya yang dibuat pada Juni 2001. Dalam definisi terbaru, profesi ini tidak lagi secara eksplisit menggunakan teori perilaku manusia dan sistem sosial serta fokus intervensi pekerjaan sosial pada interaksi seseorang dengan lingkungan sekitar.

Charles Zastrow memakai definisi NASW (The National Association of social Workers)-IPSPI-nya Amerika-bahwa pekerjaan sosial adalah:

Aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam rangka meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka pada keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi sosial tertentu yang sekiranya dapat mewujudkan atau mendukung tujuan dari pihak yang ditolong. (Zastrow, 2017, p. 4)

Pokok-pokok penting dalam definisi ini adalah bahwa pekerjaan sosial merupakan (a) kegiatan profesional dalam (b) memberikan pertolongan dengan sasaran (c) individu, kelompok, atau masyarakat, yang bertujuan untuk (d) meningkatkan keberfungsian sosial dan (e) menciptakan kondisi sosial yang kondusif.

Kirst-Ashman dan Hull, Jr. (2006) mengutip Pincus dan Minahan (1973) dalam menetapkan tujuan pekerjaan sosial, yaitu: (a) meningkatkan kapasitas orang untuk memecahkan dan merespons (*coping*) masalah; (b) menghubungkan orang dengan sistem yang menyediakan sumberdaya, pelayanan, dan kesempatan; (c) mendorong sistem-sistem ini dapat beroperasi secara efektif dan manusiawi; dan (d) turut terlibat dalam proses penyusunan dan perbaikan kebijakan sosial (p. 5). Senada dengan tujuan ini, pekerja sosial memiliki tugas sebagai berikut (Barker, 2003, p. 410):

- a. Menolong orang untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan mereka untuk *problem solving and coping*;
- b. Menolong mereka memperoleh sumber daya yang dibutuhkan;
- c. Memfasilitasi interaksi antar individu dan antara individu dengan lingkungannya;
- d. Membuat lembaga/institusi untuk merespons permasalahan/kebutuhan orang;
- e. Mempengaruhi kebijakan sosial.

Pekerjaan sosial memang merupakan sebuah ilmu terapan di bidang sosial. Namun demikian, pekerjaan sosial tidak bersifat instrumental seperti ilmu teknik. Karakteristik ilmu praktik ini juga sangat kontekstual karena tergantung pada kondisi lokus dan tempus, sehingga teknik dan metode seperti apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tidaklah bersifat *all size* yang pasti mangkus di manapun dan kapanpun. Pantas saja jika Kirst-Ashman dan Hull, Jr. (2006) menegaskan bahwa sangatlah mustahil untuk membuat pedoman atau

panduan praktik pekerjaan sosial, seperti halnya buku resep masakan yang disusun secara detail langkah per langkah. Maka, kualitas yang paling dibutuhkan dari pekerja sosial adalah fleksibilitas dan kreativitas.

5.2. Ciri Khas Pekerjaan Sosial

Apa yang menjadi ciri khas profesi pekerjaan sosial sebagai sebuah pendekatan dibanding sejumlah profesi pertolongan lain di bidang kesejahteraan sosial? Berikut ini adalah sebagian jawabannya.

Pertama, pekerjaan sosial merupakan profesi yang dibangun di atas tiga struktur utama, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan atau keahlian (*skills*), dan nilai (*values*). Khusus terkait struktur fondasi nilai, pekerjaan sosial sering disebut sebagai praktik yang dipandu atau berlandaskan nilai. Kirst-Ashman (2010) menyebut pekerjaan sosial sebagai profesi berbasis nilai (*'a values-based profession'*). Sering pula dikatakan sebagai kegiatan yang penuh dengan muatan nilai (*'social work as value-laden activity'*).

Kedua, pekerjaan sosial merupakan profesi dengan prinsip memberdayakan. Konsep pertolongan yang kerap dipakai untuk menjelaskan hal ini adalah 'menolong orang agar dapat menolong dirinya-sendiri' (*helping people to help themselves*). Prinsip ini sangat menghindari munculnya ketergantungan pihak yang ditolong terhadap pekerja sosial.

Ketiga, masih terkait prinsip memberdayakan, model pertolongan yang digunakan berbasis kekuatan (*strength-based model*). Maknanya adalah bahwa dalam rangka memberdayakan agar pemerlu layanan dapat menolong dirinya sendiri, maka kekuatan dan segala potensi positif yang dimiliki harus digali dan dipahami, kemudian digunakan untuk pemecahan masalah atau pengembangan kapasitas. Hal ini berbeda dengan pendekatan medikal yang lebih fokus pada masalah atau aspek

negatif pemerlu layanan. Pendekatan sering disebut juga sebagai model defisit.

Berikutnya, pekerjaan sosial sangat menghargai nilai demokrasi dengan prinsip kerja partisipatif. Profesi ini juga menghormati kesetaraan relasi dimana hubungan antara pekerja sosial dan pemerlu layanan adalah setara. Hubungan keduanya bukan seperti antara ahli (*expert*) dan klien atau antara manager dan klien yang berkasus. Prinsip kesetaraan relasi tercermin pada saat pekerja sosial bekerja bersama penerima manfaat (*working with beneficiaries*) dan lingkungannya, bukan bekerja untuk klien (*working for client*). Misalnya pada saat proses pengambilan keputusan, bukanlah pekerja sosial yang mengambil keputusan. Namun, keputusan yang menentukan masa depan mereka diambil bersama-sama melalui diskusi dialektis antara keduanya tanpa manipulasi. Peran pekerja sosial hanya memfasilitasi atau membukakan pemahaman/kesadaran. Hal ini juga mencerminkan satu prinsip penting pekerjaan sosial, yakni menentukan diri-sendiri (*self-determination*).

Kelima, pendekatan pekerjaan sosial bersifat dualistik, karena fokus intervensi tidak hanya individu atau kelompok penerima manfaat, akan tetapi juga lingkungan sekitarnya. Mengutip Pincus dan Minahan (1973), Kirst-Ashman dan Hull, Jr. (2006) menekankan keunikan pekerjaan sosial pada dimensi bahwa lingkungan sekitar itulah yang justru harus jadi *'target system'* atau fokus untuk perubahan, bukan pihak pemerlu layanan yang mesti beradaptasi. Konsep dualistik pekerjaan sosial dilandasi dengan perspektif 'orang dalam lingkungan' atau *person-in-environment* (PIE) dan perspektif ekosistem. Menurut Lee *et al.* (2009), model PIE telah lama dianggap sebagai perspektif yang lebih komprehensif. Bahkan perspektif ekosistem ini telah menjadi ciri khas tersendiri bagi pekerjaan sosial yang membedakan dengan profesi-profesi lain.

Keenam, Zastrow (2017) menyoroti perbedaan pekerjaan sosial dibanding profesi lain, seperti psikologi dan psikiatri. Profesi ini punya mandat untuk menyediakan berbagai jenis layanan sosial. Tanpa harus diminta, pekerja sosial bertanggung jawab memberikan pertolongan. Zastrow juga menyebut pekerjaan sosial sebagai profesi *multi-skill*. Seorang pekerja sosial harus memiliki keahlian atau keterampilan dalam berbagai domain dan mampu menangani beragam persoalan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas. Ini artinya pekerjaan sosial tidak membatasi atau memilih masalah yang akan ditangani sesuai selera. Batasan pekerja sosial bekerja adalah bahwa jika upaya penanganan sudah di luar kapasitasnya, maka harus dirujuk (*referral*) ke kolega pekerja sosial lain. Bisa juga melibatkan profesi lain atau lembaga lain secara tim atau interdisipliner yang melibatkan multi-profesi.

6. PENUTUP

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Upaya yang mesti dilakukan adalah menjalankan pembangunan nasional yang di dalamnya tersusun kebijakan pembangunan sosial. Dalam pengertian umum, pembangunan sosial mencakup pengertian yang luas yang di dalamnya meliputi pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam literatur, kesejahteraan sosial tidak saja dimaknai sebagai suatu kondisi dambaan masyarakat yang menjadi tujuan para pendiri bangsa. Akan tetapi, istilah ini bisa merujuk ke suatu sistem atau institusi program pelayanan dan juga sebagai sebuah disiplin ilmu. Bagaimana kesejahteraan

sosial diposisikan dan memainkan peran di masyarakat akan menentukan cara/pendekatan untuk mewujudkannya. Pilihan ideologi politik sangat menentukan pendekatan yang diambil. Secara umum ada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan residual yang mencerminkan ideologi konservatisme dan pendekatan institusional yang dipengaruhi liberalisme.

Ada lagi pendekatan *developmental* atau pembangunan sosial yang menjadi alternatif dari dua pendekatan *mainstream* tersebut. Pembangunan sosial sebagai sebuah pendekatan merupakan jalan tengah untuk mengharmoniskan dua pendekatan utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Di satu sisi ada pendekatan yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai arus utama dan di sisi lain ada kebijakan dan intervensi sosial yang tidak kalah pentingnya. Program/intervensi sosial dan kemajuan ekonomi harus dibuat seiring sejalan.

Oleh James Midgley, pekerjaan sosial dianggap sebagai satu pendekatan tersendiri yang berbeda dengan pembangunan sosial versi modern. Di antara dua ideologi yang selalu berseteru dengan masing-masing pandangannya, pekerjaan sosial memang cukup adaptif dalam menerapkan kedua pendekatan tersebut. Sementara pembangunan sosial adalah pendekatan alternatif yang berupaya mengharmoniskan keduanya. Meskipun begitu, pendekatan pembangunan sosial dan pekerjaan sosial memiliki keterkaitan. Pada saat awal diterapkan di negara-negara berkembang, pembangunan sosial menjadi bentuk intervensi yang paling banyak dipraktikkan oleh pekerja sosial. Terutama ketika melakukan praktik pemberdayaan, pendekatan partisipatif dalam pembangunan sosial banyak dikuasai oleh para pekerja sosial.

Referensi

- Barker, R. (2003). *Social Work Dictionary*. US: NASW Press.
- Global Definition of Social Work*, 2014. Diakses dari <https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/> (12 April 2020)
- Ife, J. (1997). *Rethinking Social Work: Towards Critical Practice*. Australia: Addison Wesley Longman Australia Pty Limited.
- Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Kirst-Ashman, K.K. (2010). *Introduction to Social Work & Social Welfare: Critical Thinking Perspectives*. 3rd edition. Belmont CA: Brooks/Cole Cengage Learning.
- Kirst-Ashman, K.K. & Hull, Jr., G.H. (2006). *Understanding Generalist Practice*. 4th Edition. USA: Thomson Brooks/Cole.
- Lee, M.Y., Ng, S., Leung, P.P.Y. & Chan, C.L.W. (2009). *Integrative Body-Mind-Spirit Social Work: An Empirically Based Approach to Assessment and Treatment*. New York: Oxford University Press.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. (London: Sage Publications Ltd.)
- Midgley, J. & Pawar, M. (2017). Social Development: Forging Ahead. Dalam Midgley & Pawar (Eds.). *Future Directions in Social Development*. Palgrave MacMillan. Pp. 3-20. DOI 10.1057/978-1-137-44598-8.
- Payne, M. (2005). *Modern Social Work Theory*. Third edition. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang *Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Pekerjaan Sosial*
- PBB di Indonesia*, Newsletter Februari 2015. Diakses dari [http://www.un.or.id/documents_upload/newsletter/2015%2002_\(BI\)_UN%20in%20Indonesia_Newsletter.pdf](http://www.un.or.id/documents_upload/newsletter/2015%2002_(BI)_UN%20in%20Indonesia_Newsletter.pdf) (12 April 2016)
- Stiglitz, J. E. (2006). *Making Globalization Work*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Suharto, E. (2006). *Pendidikan Pekerjaan Sosial di Selandia Baru*. Paper disampaikan pada Workshop Program Pendidikan Spesialis-1 Pekerjaan Sosial, STKS, Bandung 19 Januari 2006.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.
- Zastrow, C. (2007). *The Practice of Social Work: A Comprehensive Worktext*. 8th Edition. USA: Thomson Brooks/Cole Publishing Company.
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. 12th Edition. Boston: Cengage Learning.